

Bab I Provinsi DKI Jakarta

Wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi satu Pemerintah Provinsi, lima Kotamadya dan satu Kabupaten Administratif. Selain itu di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat 30 BUMD, yang terdiri dari dua Badan Pengelola (BP), lima Perusahaan Daerah (PD) dan 23 Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Semester II TA 2006, BPK melakukan pemeriksaan atas Neraca Awal Provinsi DKI Jakarta TA 2005, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas enam entitas, serta pendapatan dan biaya pada tiga BUMD. Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Neraca Awal Provinsi DKI Jakarta per 1 Januari 2003 memuat opini "*Tidak Menyatakan Pendapat*" (*Disclaimer*), dengan jumlah aktiva sebesar Rp79,17 triliun, utang sebesar Rp328,72 miliar dan ekuitas sebesar Rp78,84 triliun.

Pendapat BPK terhadap Neraca Awal per 1 Januari 2003 adalah "TMP".

Temuan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya aset tanah Fasos Fasum sebanyak 1.100 bidang seluas 826,96 Ha sebesar Rp5,16 miliar dan aset tanah sebanyak 303 bidang seluas 245,15 Ha sebesar Rp106,40 miliar yang diperoleh sebelum tahun 2003 tanpa dokumen kepemilikan yang sah dan belum diinventarisasi ulang sehingga tidak termasuk dalam neraca awal.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pajak Reklame TA 2005 dan 2006 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Belanja Daerah Kantor Tata Bangunan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp2,84 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp892,92 miliar dan nilai penyimpangan sebesar Rp9,17 miliar.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah

2.1 Kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp2,71 miliar, terdiri dari kesalahan penetapan tarif kelas jalan sebesar Rp791,58 juta, penetapan pokok

pajak reklame kurang sebesar Rp 711,43 juta, kesalahan perhitungan pokok pajak sebesar Rp585,69 juta, dan selisih ukuran dalam penetapan pokok pajak sebesar Rp622,47 juta.

Belanja Daerah

Kantor Tata Bangunan dan Gedung

2.2 Kerugian daerah sebesar Rp 2,82 miliar dan telah disetor sebesar Rp72,00 juta disebabkan oleh: **(1)** kelebihan bayar pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, instalasi dan penataan gedung serta pengadaan mebelair sebesar Rp1,61 miliar, **(2)** volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung kurang sebesar Rp243,24 juta, **(3)** pembayaran honor dan insentif pengelolaan keamanan, honor panitia, biaya pembebasan tanah serta biaya jasa konsultasi yang tidak diperkenankan sebesar Rp631,64 juta, dan **(4)** harga barang pekerjaan CCTV melebihi harga pasar sebesar Rp339,41 juta.

Kotamadya Jakarta Utara

2.3 Kerugian daerah sebesar Rp 763,49 juta dan telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp 694,95 juta dan penggantian barang sebesar Rp 68,54 juta, disebabkan oleh: **(1)** pembayaran jasa konsultasi di tiga suku dinas dan BBM Solar pada Sudin Kebersihan serta biaya lelang Sudin Dikmenti yang tidak diperkenankan sebesar Rp129,68 juta, **(2)** pembayaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan pada tujuh Suku Dinas serta pembuatan kontainer sampah melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp551,07 juta, dan **(3)** pengadaan perangkat Sound System, sarana dan prasarana tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp82,74 juta

Kotamadya Jakarta Barat

2.4 Kerugian daerah sebesar Rp875,53 juta dan telah ditindaklanjuti dengan pemotongan SPM sebesar Rp315,89 juta dan penyeteroran ke Kas Daerah sebesar Rp473,65 juta atas: **(1)** biaya jasa konsultasi pada tiga Suku Dinas Kotamadya Jakarta Barat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp93,64 juta, **(2)** volume pekerjaan taman, jalan, bangunan/gedung, drainase, JPO pada tujuh Sudin dan Satu Bagian di Kotamadya Jakarta Barat kurang sebesar Rp641,29 juta dan kelebihan bayar pekerjaan rehabilitasi total SMP sebesar Rp65,75 juta, dan **(3)** pengadaan barang/jasa dan pekerjaan rehabilitasi 17 Kantor Lurah dan dua Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan standar harga satuan sebesar Rp74,85 juta.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.5 Kerugian daerah sebesar Rp363,82 juta dan telah disetor seluruhnya, terjadi karena: **(1)** volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung, taman dan jalan di lima pulau kurang sebesar Rp100,28 juta, **(2)** kelebihan

bayar ongkos angkut pekerja, pengawas lapangan dan pekerjaan penyelesaian dermaga sebesar Rp147,89 juta, dan (3) kesalahan penerapan dan melebihi patokan harga satuan atas pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung, perlengkapan dan pemeliharaan sebesar Rp115,65 juta.

**Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat DPD/DPW Parpol
Provinsi DKI Jakarta**

2.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2005 pada dua DPD Parpol sebesar Rp68,46 juta belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap, sehingga kurang akuntabel.

Hasil Pemeriksaan BUMD

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan dan Biaya pada PT RS Cengkareng, PD Sarana Jaya dan PT Bank DKI dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp4,12 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp1,37 triliun dan nilai penyimpangan sebesar Rp94,56 miliar.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

PT Rumah Sakit Cengkareng

3.1 Pembayaran jasa dokter dan Satpam sebesar Rp353,96 juta melebihi ketentuan, serta harga pengadaan alat kesehatan melebihi dari yang ditetapkan sebesar Rp10,18 juta merugikan keuangan PT RSC sebesar Rp364,14 juta.

3.2 Pendapatan bruto dari tindakan CT Scan dan Haemodialisa kurang diterima sebesar Rp99,98 juta serta kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 23 atas sewa peralatan belum dipotong sebesar Rp21,53 juta

PD Pembangunan Sarana Jaya

3.3 Penetapan penghasilan Direksi sebesar Rp459,03 juta, pinjaman Uang Muka Kendaraan Direksi sebesar Rp458,18 juta tidak sesuai ketentuan dan harga kontrak pekerjaan jasa konsultasi lebih mahal sebesar Rp134,34 juta sehingga merugikan keuangan PD PSJ sebesar Rp1,05 miliar

3.4 Kewajiban dan denda pihak rekanan sebesar Rp4,87 miliar, penerimaan usaha sebesar Rp184,44 juta dan kewajiban Penyewa Rumah Susun Bertingkat sebesar Rp1,17 miliar yang sudah jatuh tempo belum direalisasi/dilunasi, dan denda keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah tinggal belum dikenakan sebesar Rp76,63 juta mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,29 miliar.

PT Bank DKI

3.5 Sewa dan renovasi gedung yang dilakukan untuk Kantor Cabang Tangerang, ternyata gedung tersebut telah dilelang sehingga dirugikan sebesar Rp1,85 miliar.

3.6 Hasil lelang atas jaminan kredit macet lebih rendah dari baki debit hapus buku merugikan PT Bank DKI sebesar Rp784,80 juta

3.7 Kredit hapus buku tanpa dokumen agunan mengakibatkan kerugian sebesar Rp4,26 miliar.

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa s.d. akhir Semester II TA 2006 sebanyak 548 temuan dan 1.055 saran sebesar Rp86,47 triliun, sebanyak 389 saran sebesar Rp1,49 triliun telah ditindaklanjuti. Sisa 666 saran sebesar Rp84,97 triliun belum ditindaklanjuti.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, dimuat dalam daftar berikut ini.

(dalam juta rupiah)

No	Temuan Pemeriksaan			Temuan Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti		Temuan Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti		
	Periode	Jumlah		Jumlah Saran	Nilai	Jumlah Saran	Nilai	
		Temuan	Saran					Nilai
1	S.d akhir Semester I TA 2006	368	690	4.521.616,92	389	1.487.112,62	301	3.034.504,30
2	Semester II TA 2006	180	365	81.949.797,32	0	3.834,09	365	81.945.963,23
Jumlah		548	1055	86.471.414,24	389	1.490.946,71	666	84.980.467,53